

Rasionalitas Pemilih dalam Pemilu Tahun 2024: Studi Tentang Perbedaan Pilihan Calon Presiden dan Partai Politik di Kota Surabaya

Andi Setiawan ¹⁾, Katon Galih Setyawan ²⁾, Sukma Perdana Prasetya ³⁾,
Agung Stiawan ⁴⁾

^{1), 2), 3), 4)} S1 Pendidikan IPS, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Surabaya

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh data yang menunjukkan adanya perbedaan pilihan Politik antara Calon Presiden dan Partai Pendukung yang terjadi di Indonesia tak terkecuali kota Surabaya. Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini antara lain : 1) Mengetahui rasionalitas pemilih pemilu 2024, 2) Mengetahui penyebab terjadinya perbedaan pilihan antara Calon Presiden dan Partai Politik Pendukung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan sumber data penelitian ini adalah wawancara kepada masyarakat di 16 kecamatan di kota Surabaya yang terindikasi memiliki jumlah perbedaan yang paling signifikan. Hasilnya adalah saat ini masyarakat sudah mulai pintar dalam memilih calon pemimpin melihat dari visi, misi dan track record. Karakteristik seorang calon pemimpin, menjadi faktor yang banyak dijadikan alasan masyarakat untuk memilih Pemimpin selanjutnya. Dalam pendidikan IPS yang mengintegrasikan topik-topik seperti Pemilu dan partisipasi politik dapat membantu siswa memahami hubungan antara individu, masyarakat, dan negara. Studi ini menunjukkan bahwa siswa yang terlibat dalam diskusi tentang Pemilu cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik tentang peran mereka dalam masyarakat dan pentingnya kontribusi mereka dalam proses demokrasi.

Kata Kunci: Perbedaan Pilihan, Rasionalitas, Masyarakat, Calon Pemimpin, Pendidikan IPS.

Abstract

This study is based on data showing differences in political choices between presidential candidates and their supporting political parties in Indonesia, including the city of Surabaya. The objectives of this study include: 1) Understanding voter rationality in the 2024 election, and 2) Identifying the causes of the differences in choices between presidential candidates and their supporting political parties. This research employs a descriptive qualitative method, with data sourced from interviews conducted with residents in 16 districts in Surabaya, identified as having the most significant differences. The findings reveal that people are becoming more discerning in choosing leaders, focusing on candidates' vision, mission, and track record. The characteristics of a leader have become a major factor influencing voters' decisions for future leaders. In social studies education (IPS), integrating topics such as elections and political participation can help students understand the relationship between individuals, society, and the state. This study demonstrates that students who engage in discussions about elections tend to have a better understanding of their roles in society and the importance of their contributions to the democratic process.

Keywords: Choice Differences, Rationality, Society, Leadership Candidates, Social Studies Education.

How to Cite: Setiawan, A., dkk. (2025). Rasionalitas Pemilih dalam Pemilu Tahun 2024: Studi Tentang Perbedaan Pilihan Calon Presiden dan Partai Politik di Kota Surabaya. Dialektika Pendidikan IPS, Vol 5 (No. 02) 2025: halaman 47 - 55

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan sebuah negeri yang menganut sistem kerakyatan atau kita kenal dengan istilah demokrasi, yaitu dimana menempatkan kedudukan warga menjadi pemegang kekuasaan tertinggi. Metode kerakyatan ini adalah suatu metode dalam menjalankan sebuah negara, yang mana sistem atau metode ini merupakan metode yang paling banyak dianut oleh negara-negara di seluruh penjuru dunia termasuk dengan negara kita, Indonesia. Demi mewujudkan suatu demokrasi, maka ada beberapa prinsip-prinsip demokrasi yang wajib dilakukan demi keberlangsungan demokrasi di suatu bangsa, salah satunya adalah melaksanakan Pemilihan Langsung atau Pemilu. Menurut Robert A. Dahl, serta Juan J. Linz pada saat konferensinya yang diselenggarakan di Bangkok pada 1965, dikemukakan ketentuan-ketentuan dasar utama dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan yang demokratis di bawah *Rule of Law* adalah: 1) Perlindungan Konstitusional, yaitu konstitusi, bukan hanya terjaminnya kebebasan orang, wajib memberikan cara-cara mekanisme demi mendapatkan penjagaan dari kebebasan yang dilindungi; 2) lembaga kehakiman independen serta tidak berpihak (*independent and impartial tribunals*); 3) Pemilu yang bebas; 4) keleluasaan dalam memberikan pikiran; 5) keleluasaan pada perkumpulan, membentuk organisasi/berserikat dan beroposisi; dan 6) pendidikan kewarganegaraan (*civil education*) (Budhiati, 2021).

Setelah disahkannya Undang-Undang Pemilu Republik Indonesia Nomor 7 (2017, 2019, dan 2024 disebut tahun politik), maka DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan anggota DPRD akan dipilih secara bersamaan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1(1) Undang-Undang Pemilu Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 yang menjadi pedoman penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden pada 2019 dan 2024 tentang mekanisme, tata cara, serta syarat-syarat pemilu Calon presiden dan wakil presiden. Undang-undang ini mewajibkan pasangan calon presiden dan wakil presiden memenuhi ambang batas pemilihan presiden. Sesuai Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pasangan calon diajukan dari partai politik peserta pemilu atau kombinasi partai politik yang melengkapi syarat-syarat untuk memperoleh 20% kursi pada besaran kursi DPR atau 25% dari jumlah suara resmi secara nasional di pemilu DPR lebih dahulu (Sukimin, 2020).

Pemilu merupakan proses demokratis dengan tujuan memilih pemimpin seperti Presiden dan Wakil Presiden dan perwakilan agar dapat mengawasi jalannya pemerintahan seperti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah. Indonesia tercatat telah melakukan Pemilu sebanyak 13 kali (termasuk pemilu 2024) dan dilakukan pertama yakni pada era kepemimpinan Presiden Soekarno pada tahun 1955. Pelaksanaan Pemilihan Umum ini diadakan oleh badan yang bernama Komisi Pemilihan Umum dan diawasi oleh Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), hal ini tertera di Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Jika kita perhatikan, didalam UU tersebut juga mengatur bagaimana tugas KPU dalam menyelenggarakan Pemilu di Indonesia, seperti mengatur agenda, jumlah pengeluaran yang dibutuhkan, menetapkan agenda pemilihan umum (Undang-Undang Republik Indonesia, 2024).

Pemilu ini kiranya penting untuk diberikan pendidikan atau edukasi kepada para siswa-siswi di sekolah sejak usia dini. Karena bagaimanapun mereka kelak akan menjadi penerus bangsa dan menggantikan orang-orang yang saat ini menjalankan pemerintahan atau bernegara. Dalam negara demokrasi, partisipasi masyarakat dalam pemilu sangat amatlah penting. Untuk itu, pentingnya edukasi demokrasi ini dilakukan terhadap anak-anak baik secara kekeluargaan dimana para orang tua dianjurkan untuk memberikan pendidikan demokrasi kepada anak-anaknya maupun di bidang pendidikan, dimana edukasi ini diberikan kepada siswa dan siswi disekolah. Dalam negara demokrasi, rakyat mesti turut berkontribusi dalam bagian sistem demokrasi, serta harus berperan sangat kuat

untuk memilih anggota parlemen baik legislatif maupun eksekutif baik daerah maupun nasional. Pemilihan umum, atau sering kali pemilu, adalah suatu kegiatan pemerintahan yang dilakukan tiap setiap lima tahun dan dilaksanakan dengan berbarengan di penjuru daerah di Indonesia. Adanya pemilu menunjukkan syarat-syarat demokrasi, saat masyarakat terlibat secara nyata pada kebijakan politik arah dan nasib negara lima tahun ke depan (Rahmad, 2023).

Dalam pembelajaran IPS, terdapat Pendidikan Karakter. Pembangunan pendidikan karakter sangatlah efektif, mengingat keberlangsungan serta kesejahteraan masyarakat pada masa depan. Pasal 20 ayat 3 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2003 memberikan pernyataan bahwa: Pendidikan nasional berfungsi dalam membangun bakat serta menciptakan karakter dan peradaban masyarakat yang berkualitas agar kehidupan rakyat menjadi lebih bijaksana. Tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan siswa dan siswa untuk menjadikan manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, menjadi rakyat yang sehat, berpendidikan, pandai berkomunikasi, inovatif, dapat berjalan sendiri, demokratis, serta bertanggung jawab (Asnani, 2020). Pendidikan karakter sejalan dengan tujuan IPS, yaitu. membentuk siswa dan siswa untuk menjadi rakyat yang baik, berpengetahuan, keterampilan, serta kesadaran sosial yang bermanfaat untuk diri sendiri, lingkungan, dan bangsa. Dengan mencapai hal tersebut, pembelajaran tidak hanya terbatas pada pengetahuan (kognitif) dan keterampilan (psikomotor), tetapi mencakup aspek moralitas (afektif) dan tanggung jawab sesuai nilai-nilai Pancasila (Acep Iyan, 2022).

Pemilihan Umum (Pemilu) memiliki keterkaitan yang erat dengan pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) karena memberikan konteks nyata untuk memahami konsep-konsep demokrasi, partisipasi politik, dan kesadaran sosial. Dalam kurikulum IPS, Pemilu dapat digunakan sebagai studi kasus yang membantu siswa memahami mekanisme demokrasi, pentingnya partisipasi aktif warga negara, serta dampaknya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Melalui pemahaman ini, siswa dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis terhadap isu-isu yang berkaitan dengan pemerintahan dan politik. Pemilu juga berfungsi sebagai alat pendidikan dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi sejak dini. Siswa diajarkan tentang hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, termasuk pentingnya menggunakan hak pilih mereka secara bertanggung jawab. Ini sejalan dengan konsep Pendidikan Kewarganegaraan yang menjadi bagian dari IPS, di mana siswa didorong untuk memahami peran mereka dalam membentuk masa depan bangsa melalui partisipasi dalam proses demokrasi.

Tahun 2024 ini merupakan pesta demokrasinya di Indonesia, karena pada tahun ini diselenggarakannya Pemilu, baik untuk pemilihan Presiden, DPR, DPRD, DPD dan Kepala Daerah. Pada kesempatan Pemilu tahun ini terdapat 3 (tiga) Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, 18 Partai Nasional dan 6 Partai Politik Lokal Aceh sebagai peserta Pemilu 2024. Penghitungan hasil perolehan suara Calon Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPRD, dan DPD telah berlangsung pada tanggal 14 Februari 2024 lalu. Tepat pada Rabu, 20 Maret 2024, KPU telah mengumumkan hasil Pemilu secara nasional baik Pemilihan Presiden, Pileg, DPRD hingga DPD termasuk wilayah Kota Surabaya, Jawa Timur. Informasi yang diberikan oleh KPU menyatakan bahwa, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 yakni Prabowo-Gibran, telah memenangkan Pemilihan Presiden pada tahun ini dengan persentase sebesar 58% yang mana Paslon 02 ini memenangkan atau memimpin peroleh suara di 36 dari 38 Provinsi yang tersebar diseluruh penjuru tanah air. Lalu, untuk Partai Politik yang memenangkan Pemilu tahun ini masih dipegang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai petahana atau pemenang pemilu dalam Pileg untuk yang ke-tiga kalinya sejak Pemilu 2014 dengan meraih sejumlah suara nasional dengan persentase sebesar 16% (Komisi Pemilihan Umum, 2024)

Pengumuman yang telah disampaikan oleh KPU pada 20 Maret 2024 kemarin, selain perolehan suara secara nasional, kita juga dapat melihat hasil-hasil suara yang diperoleh baik untuk Pilpres, Pileg,

DPRD, dan DPD diberbagai wilayah yang ada di Indonesia termasuk didalamnya adalah Kota Surabaya, Jawa Timur. Dalam data yang dipaparkan oleh KPU selaku penyelenggara Pemilu, gabungan jumlah suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden beserta Partai Politik pengusung menemukan sebuah perbedaan yang cukup signifikan dalam pemungutan suara di wilayah Kota Surabaya.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Bogdan dan Taylor (dalam Abdussamad, 2021: 29) berpendapat jika penelitian kualitatif ialah langkah-langkah penelitian yang menciptakan data deskriptif, yaitu data yang dihasilkan dari wawancara kepada informan, kata-kata tertulis, dan sikap yang diperhatikan; pendekatannya dihadapkan dalam lingkungan dan orang-orang secara keseluruhan. Penelitian ini dilaksanakan tepatnya di 16 jumlah kecamatan yang ada di kota Surabaya, Jawa Timur. Pemilihan kecamatan-kecamatan tersebut bukan tanpa sebab melainkan data yang peneliti peroleh dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait adanya perbedaan-perbedaan yang terjadi pada 16 kecamatan tersebut dalam memilih Calon Presiden dan Partai Politik pada Pemilu 2024 lalu. Subjek dari penelitian ini adalah masyarakat kota Surabaya yang berdomisili di 16 kecamatan tersebut, telah berusia minimal 17 tahun, mengikuti pemilu 2024 lalu, dan memiliki perbedaan pilihan antara Calon Presiden dan Partai Politik. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung peneliti menemui informan-informan terkait yang masuk dalam kualifikasi yang telah ditentukan sedangkan dalam dokumentasi, peneliti menemukan data-data hasil perolehan suara dari pihak penyelenggara pemilu dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU). Selain itu, peneliti juga melakukan dokumentasi berupa gambar terhadap para informan saat wawancara agar menjadi bukti peneliti telah melakukan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN (12 pt, bold)

Hasil Perolehan Suara Pilpres dan Pileg di Kota Surabaya pada Pemilu 2024

Berdasarkan data yang peneliti kumpulkan yang bersumber dari website resmi KPU Surabaya yakni *kota-surabaya.kpu.go.id*, peneliti mendapatkan hasil Pemilu yang telah selesai diselenggarakan dan diumumkan oleh KPU Surabaya tepatnya pada bulan Maret tahun 2024 yang berisikan beberapa hasil sebagai berikut:

1. Hasil perolehan suara Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden di Kota Surabaya. Pasangan 02 yakni Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming Raka dinyatakan memenangkan perolehan suara di Kota Surabaya, dengan rincian memenangkan perolehan suara di seluruh Kecamatan (total ada 31 Kecamatan) yang ada di Kota Surabaya.
2. Hasil perolehan suara Partai Politik di Kota Surabaya. Secara mengejutkan pada Pemilu tahun 2024 lalu, PDI-Perjuangan yang selalu menang dalam pemilihan partai politik pada edisi sebelumnya harus mengakui keunggulan Partai Gerindra yang dinyatakan sebagai partai pemenang pemilu di tahun 2024. Walau begitu, PDI-Perjuangan masih tetap berada di urutan ke-2 dengan hanya selisih sedikit dengan Partai Gerindra dan diurutan ke-3 ada Partai Golkar atau Golongan Karya. Walaupun begitu, KPU tetap mengumumkan bahwa Partai pemenang Pemilu edisi kali ini adalah PDI-Perjuangan karena memenangkan di 22 Kecamatan yang tersebar di seluruh Kota Surabaya.
3. Hasil perolehan suara Koalisi Partai Politik di Kota Surabaya. Untuk perolehan suara untuk partai politik tentu dimenangkan oleh koalisi partai yang ada di kubu 02. Hal ini tidak lepas kubu 02 merupakan koalisi yang paling banyak atau gemuk dalam pemilu kali ini dengan 8

partai gabungan yang ada di kubu 02, ini hanya menjadi separuh dari koalisi yang ada di 01 dan 03 yang masing-masing hanya terdapat 4 partai politik gabungan.

4. Perbedaan perolehan hasil suara koalisi Partai Politik dan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden di Kota Surabaya. Perbedaan yang paling signifikan terdapat di kubu 01 dan 03. Jika dilihat pada paparan hasil perolehan suara oleh KPU Surabaya, 01 mendapat kekurangan perolehan suara (jika dilihat dari hasil gabungan partai politik 01 dan hasil jumlah perolehan suara 01, yakni - 6,16%). Berbanding terbalik dengan 02 yang mendapatkan jumlah positif perolehan suara (dari koalisi partai politik dengan suara untuk Presiden, yakni + 8,52%).

Rasionalitas Pemilih

Max Weber (dalam Umanailo, 2023) membagi beberapa macam tindakan sosial. Semakin rasional suatu tindakan, semakin mudah untuk dipahami. Pembagian tindakan sosial dibedakan menjadi empat macam, yaitu: Pertama, tindakan rasionalitas instrumental, yaitu tindakan yang ditentukan oleh keinginan, mempunyai tujuan yang ingin dicapai, dan menentukan nilai dari tujuan itu sendiri. Jika seseorang berperilaku rasional, maka tindakannya dapat dipahami; Kedua, tindakan rasional berbasis nilai, yakni tindakan yang didasarkan pada kesadaran akan nilai-nilai penting, seperti etika, estetika, agama dan nilai-nilai lain yang mempengaruhi perilaku dan kehidupan manusia. Tindakan ini masih rasional, walaupun tidak serasional tindakan pertama, sehingga tindakan tersebut masih dapat dimaklumi; Yang ketiga adalah tindakan afektif, yaitu suatu tindakan yang ditentukan oleh keadaan mental dan perasaan orang yang melakukannya. Tindakan ini dilakukan seseorang berdasarkan perasaannya, yang biasanya muncul secara spontan begitu ia mengalami suatu peristiwa. Perilaku ini sulit dipahami karena kurang rasional. Keempat tindakan tradisional merupakan kegiatan yang berdasarkan adat istiadat yang sudah mendarah daging. Kegiatan ini biasanya dilakukan berdasarkan tradisi atau adat istiadat yang diwariskan secara turun temurun. Perilaku ini juga sulit dipahami karena kurang rasional bahkan tidak rasional.

Masyarakat Kota Surabaya yang peneliti temui di beberapa kecamatan memiliki alasan sendiri dalam menentukan pilihannya masing-masing pada Pemilu yang dilaksanakan di tahun ini. Peneliti sendiri mendatangi masyarakat kota Surabaya, tepatnya di 16 Kecamatan yang terindikasi terdapat perbedaan perolehan suara atau pilihan politik antara calon Presiden dan wakil Presiden dengan Partai Politik pengusungnya. Jika dikaitkan dengan teori tindakan sosial yang dikemukakan oleh Max Weber, masyarakat kota Surabaya juga memiliki alasan – alasan memilih calon pemimpin yang masuk ke dalam kategori pendapat dari Max Weber tersebut. Dalam penelusuran di lapangan, peneliti menemukan alasan-alasan masyarakat Kota Surabaya masuk dalam kategori definisi rasionalitas Max Weber untuk menentukan pilihannya dalam Pemilu 2024 lalu.

Sebagai contoh dalam kelompok tindakan rasionalitas Instrumental, peneliti menemukan bahwa masyarakat Kota Surabaya memiliki alasan yang sangat masuk akal atau secara logis dalam menentukan pilihannya. Alasan-alasan tersebut diantaranya adalah Visi Misi yang ditawarkan oleh calon Pemimpin. Visi misi ini menjadi penting karena akan menjadi sebuah gambaran kedepan calon Pemimpin akan melakukan apa jika nantinya calon tersebut terpilih menjadi seorang Pemimpin di negeri ini. Dalam kelompok tindakan rasionalitas karakteristik, masyarakat kota Surabaya juga memiliki alasannya tersendiri dan yang paling banyak ditemui adalah bagaimana karakter “tegas” yang menjadi sebuah nilai tambah bagi seorang calon Pemimpin di negeri ini. Karakter tegas ini paling banyak ditujukan untuk paslon 02 yakni Bapak Prabowo Subianto yang mana memang beliau adalah lulusan Militer, karakter yang demikian akan melekat pada beliau. Untuk kategori atau kelompok Afektif, peneliti menemui masyarakat kota Surabaya yang mulai tumbuh atau masih duduk di bangku sekolah menengah atas (SMA) memilih seorang calon Pemimpin dari segi fisik walaupun sangat tidak relevan atau tidak berkesinambungan untuk seorang pemimpin, contohnya

dalam kasus pemilu 2024 lalu adanya fenomena “Gemoy” yang sempat ramai di media sosial untuk salah satu calon tertentu dan itu nyata masih terjadi di lingkungan saat ini khususnya kota Surabaya. Sementara untuk kelompok rasionalitas terakhir yakni tindakan tradisional yang mana tindakan ini merupakan sebuah tradisi turun-menurun yang sudah dilakukan oleh sebuah keluarga, komunitas atau sebagainya dalam jangka waktu yang cukup lama. Dalam hal ini, peneliti menemukan seseorang yang memang setiap datangnya pemilu, dia hanya mengikuti apa kata orang tuanya, dan dia mengikutinya saja tanpa ada perlawanan atau pilihan yang berbeda dari keluarganya tersebut. Teori Max Weber dalam hal Rasionalitas nyatanya masih sangat relevan digunakan saat ini dalam menentukan pilihan calon pemimpin khususnya bagi masyarakat kota Surabaya. Walaupun dengan perkembangan zaman dan teknologi yang sangat pesat terjadi seharusnya menjadikan hal tersebut untuk kemampuan berfikir yang jauh lebih baik, dan bertindak sesuai dengan penalaran yang baik tetapi hal-hal yang tidak bisa di terima alasan memilih calon pemimpin nyatanya di hari ini masih dapat kita lihat di lingkungan sekitar.

Penyebab Terjadinya Perbedaan Jumlah Perolehan Suara antara Calon Presiden dan Partai Politik Pengusung.

Dalam pemilu kali ini juga ada hal yang menarik untuk di bahas yakni adanya perbedaan perolehan suara yang diperoleh baik dari partai politik itu sendiri baik dengan Pemilihan Legislatif maupun Pemilihan Presiden. Kita ketahui bersama, bahwa seorang calon Presiden agar bisa maju berkompetisi di dalam Pemilu harus memiliki kendaraan yang dinamakan Partai Politik. Partai Politik lah yang nantinya membawa nama-nama untuk dijadikan sebagai “Jagoan” dalam pertarungan pemilihan Presiden dengan calon lain yang tentunya juga di usung oleh Partai-Partai lain. Hal yang menarik dalam hasil pemilu tahun 2024 khususnya di Kota Surabaya adalah terdapat perbedaan perolehan suara antara suara Partai Politik dengan Paslon Presiden dan wakil Presiden yang diusung atau diajukan dalam pertarungan pemilu pada tahun ini. Perbedaan yang paling signifikan terjadi pada paslon 01 dan 02, sedangkan 03 yakni Pak Ganjar dan Prof. Mahfud dalam kasus di kota Surabaya tidak memiliki perbedaan yang cukup besar bahkan dapat dikatakan sebagai “margin of error” dan itu masih dapat di terima. Sedangkan untuk 01 dan 02 memiliki perbedaan yang cukup besar, untuk 01 dan partai politik pendukung memiliki perbedaan sebesar -6,16% atau suara gabungan partai politiknya lebih besar dibandingkan dengan suara perolehan calon Presiden yang diusung. Jika 01 suara perolehan Presidennya lebih kecil dibanding suara partai politik pendukungnya, hal ini berbalik dengan 02. Perolehan suara partai politik gabungan di 02 justru lebih kecil dibandingkan suara perolehan calon Presidennya. Perbedaannya pun cukup besar, yakni sebesar 8,52% meningkat tajam dari perolehan gabungan partai politik yang ada di paslon 02.

Untuk kasus tersebut, peneliti mencoba mencari tahu bagaimana hal ini dapat terjadi. Bagaimana seseorang memilih calon Presiden dan partai politik yang tidak sejalan atau tidak dalam barisan yang sama. Peneliti menemukan alasan-alasan mengapa perbedaan perolehan suara dapat terjadi di kota Surabaya. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan) merupakan partai pemenang yang ada di kota Surabaya namun ternyata orang-orang kota Surabaya yang memilih PDI-Perjuangan dalam pemilu kemarin tidak memilih calon Presiden yang dijagokan atau diusung oleh PDI-Perjuangan itu sendiri. Ada yang memilih Pak Anies Baswedan dan adapula yang memilih Pak Prabowo sebagai Presiden selanjutnya walaupun mereka-mereka ini bukan calon Pemimpin yang diusung oleh PDI-Perjuangan. Sebab mereka tetap memilih PDI-Perjuangan sebagai partai yang di lihat dan tetap ada di hati masyarakat kota Surabaya adalah dapat di lihat rekam jejak masa lalu. PDI-Perjuangan ini jika dalam pemerintahan sebagai oposisi atau sebagai yang mengawasi jalannya pemerintah, PDI-Perjuangan memiliki jiwa yang sangat Pro terhadap rakyat. Itulah sebabnya masyarakat ingin PDI-Perjuangan ini tetap hadir untuk masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Mereka ingin PDI-Perjuangan kembali bersama rakyat dalam membangun negeri dan

mengawasi jalannya pemerintahan agar mereka-mereka yang berkuasa tidak dapat semena-mena membuat aturan-aturan yang sangat merugikan rakyat terutama rakyat-rakyat kecil.

Faktor Pendorong dan Penghambat

Dalam peneliti yang temukan di lapangan, ada beberapa faktor pendorong dan penghambat agar seorang paslon atau Partai di pilih oleh masyarakat Surabaya pada pemilu 2024 lalu. Terdapat beberapa faktor pendorong yang memengaruhi pemilihan seorang pemimpin oleh masyarakat Kota Surabaya. Pertama adalah program visi dan misi yang ditawarkan oleh para pasangan calon. Dari sisi rasionalitas, masyarakat cenderung menimbang dan mempertimbangkan visi misi mana yang dinilai realistis, bermanfaat, serta relevan dengan kebutuhan rakyat Indonesia. Kedua, karakteristik calon pemimpin juga menjadi aspek penting. Karakter seperti ketegasan sering disebut dalam penelitian sebagai sifat utama yang dicari masyarakat, di mana dalam konteks ini, Prabowo dinilai unggul dalam hal ketegasan dibandingkan kandidat lainnya. Ketiga adalah identitas, yaitu hal-hal yang melekat pada diri seseorang dan mencerminkan siapa dia. Identitas ini dapat dibentuk oleh latar belakang keluarga, budaya, keyakinan, pengalaman pribadi, etnis, dan kelompok sosial. Keempat, simpati menjadi pendorong lainnya, di mana masyarakat memberikan dukungan karena merasa tersentuh atau terhubung secara emosional. Dalam pemilu kali ini, Prabowo berhasil menarik simpati dari beberapa kalangan masyarakat, terutama saat debat capres dan cawapres yang menyoroti isu pertahanan negara. Terakhir, faktor tradisional juga memiliki pengaruh, yaitu kebiasaan turun-temurun dalam keluarga untuk memilih kandidat tertentu sebagaimana pilihan pada pemilu sebelumnya. Tradisi ini membuat kecenderungan pilihan politik menjadi relatif tetap dalam suatu keluarga atau komunitas.

Peneliti juga menemukan beberapa faktor yang menjadi penghambat seorang calon pemimpin ataupun politisi bahkan sebuah partai tidak dipilih oleh masyarakat Surabaya. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat bagi seorang pemimpin atau partai politik untuk dipilih oleh masyarakat Kota Surabaya. Salah satunya adalah program visi dan misi yang kalah unggul dibandingkan dengan calon lainnya. Program yang tidak realistis atau kurang menarik akan membuat masyarakat cenderung mengalihkan pilihannya kepada pasangan calon lain yang memiliki visi dan misi lebih kuat serta relevan dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, track record atau rekam jejak para calon juga memengaruhi keputusan pemilih. Jika citra masa lalu calon Presiden dan Wakil Presiden dianggap buruk, maka kepercayaan masyarakat untuk memilihnya sebagai pemimpin Indonesia selama lima tahun ke depan akan menurun. Faktor lain yang turut berperan adalah adanya tindakan kriminal yang dilakukan oleh kader partai politik tertentu, seperti kasus korupsi. Hal ini menyebabkan sebagian masyarakat enggan memberikan dukungannya kepada partai tersebut karena merasa kecewa dan tidak percaya pada integritas partai itu.

KESIMPULAN

Pemilu 2024 di Indonesia berhasil dilaksanakan di seluruh wilayah meskipun terdapat sengketa dari pihak-pihak yang merasa dirugikan. Beberapa sengketa tersebut meliputi tuduhan distribusi bansos untuk mendukung salah satu pasangan calon, intervensi aparat kepolisian, serta gerakan kepala desa di daerah tertentu. Namun, Mahkamah Konstitusi akhirnya menetapkan pasangan calon 02, Prabowo dan Raka Buming Raka, sebagai pemenang. Dalam proses ini, pemilih menunjukkan kecerdasan dengan lebih kritis menilai visi, misi, rekam jejak, dan cara kampanye calon pemimpin, meskipun politik uang masih terjadi dalam skala kecil. Pemilih juga cenderung memilih berdasarkan karakteristik, identitas, dan program pasangan calon, dengan relevansi teori rasionalitas Max Weber yang menunjukkan bahwa faktor karakteristik calon lebih dominan. Pemilih mengutamakan pemimpin yang tegas dalam mengambil keputusan, di mana identitas pemimpin, khususnya yang terkait dengan organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU), tetap berpengaruh besar. Teknologi dan media sosial mempermudah masyarakat untuk menilai program calon dan berperan signifikan

dalam memengaruhi pemilih yang masih bimbang. Selain itu, Pemilu memberikan manfaat besar bagi pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dengan mengajarkan nilai-nilai demokrasi, meningkatkan kesadaran kewarganegaraan, membangun pemahaman tentang struktur pemerintahan, serta mendorong sikap kritis dan analitis siswa. Dengan demikian, Pemilu tidak hanya menjadi praktik demokrasi yang penting, tetapi juga sarana pendidikan yang relevan untuk mencetak warga negara yang kritis, aktif, dan berpengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press.
- Acep Iyan, A. R. (2022). Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar. *Journal on Education*, 5(1), 908-917.
- Agustin, R. S. (2019). Rasionalitas Pemilih Bupati Tulungagung Pada Pilkada 2018 (Studi di Kel. Kenayan, Kec. Tulungagung, Kab. Tulungagung). *Paradigma*.
- Asnani, M. S. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan Karakter dalam Meminimalisasi Kenakalan Remaja. *Jurnal Mappesona*, 3(2).
- Budhiati, T. S. (2021). *Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan*. Sinar Grafika.
- Elwidarifa Marweny, S. W. (2022). Tinjauan Hukum Tentang Pemilihan Umum Presiden Pasca Reformasi Dikaitkan dengan Teori Demokrasi. *Ensiklopedia of Journal*, 5(3), 62-70.
- Hidayat, R. (2016). Rasionalitas: Overview Terhadap Pemikiran dalam 50 Tahun Terakhir. *Buletin Psikologi*, 24(2), 101-122.
- I Gede Wijaya Kusuma, I. A. (2020). Fungsi Partai Politik dalam Pendidikan Politik Masyarakat. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(1), 164-169.
- Irwansyah Mansur, G. K. (2019). Rasionalitas Orientasi Politik Masyarakat Nelayan pada Pemilihan Umum di Kabupaten Majene. *The Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 1-13.
- Jati, W. R. (2022). Perilaku Memilih Rasional dalam Pemilu Indonesia Kontemporer: Perbandingan Pemilu 2014 dan Pemilu 2019. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 70-84.
- Komisi Pemilihan Umum. (2024). Retrieved from Komisi Pemilihan Umum: kpu.go.id
- Liata, N. (2020). Relasi Pertukaran Sosial Antara Masyarakat dan Partai Politik. *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAl)*, 79-95.
- Machfud, M. H. (2020). Perilaku Pemilih Masyarakat Kabupaten Lamongan pada Pilpres 2019. *Paradigma*.
- Meliala, W. (2020). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN PENERAPAN STRATEGI BERTAHAN DAN MENYERANG UNTUK MEMENANGKAN PERSAINGAN. *Jurnal Citizen Education*.
- Murwanto, M. (2022). Pendidikan Transformatif Dalam Pembentukan Karakter. In *PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN PROFESI GURU*.
- Myaskur, M. (2023). Politik Hukum Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Pasca Reformasi.
- Nurjanah, K. &. (2022). Implementasi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dengan Tema Suara Demokrasi di SMK Setia Karya. In *Seminar Nasional Pendidikan Sultan Agung*.
- Rahmad, N. (2023). Pentingnya Peran Aktif Masyarakat dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum*, 63-70.
- Sukimin, S. (2020). Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. *Jurnal Usm Law Review*, 3(1), 112-134.
- Umanailo, M. C. (2023). Rasional dan Irasional Dalam Tindakan Sosial Max Weber. *Sosiologis: Kajian Sosiologi Klasik, Modern dan Kontemporer*, i-iv.

Undang-Undang Republik Indonesia. (2024, Maret 4). Retrieved from Komisi Pemilihan Umum:
<https://jdih.kpu.go.id/countuu-524a545652544e45>